PERAN ALOKASI DANA DESA BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KAJAR TENGUULI KECAMATAN PRAMBIN KABUPATEN SIDAORJO

* Abdul Hendriyanto Wahyono & Anggraeni Fattah

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: 10.46821/bharanomicss.v1i1.13

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Alokasi Dana Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kajar Tengguli. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer didapatkan saat melakukan penelitian di lokasi penelitaian, sedangkan data sekunder didapatkan dari jurnal, penelitian terdahulu dan beberapa referensi lainnya. Objek penelitian ini adalah Desa Kajar Tengguli Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kajar Tengguli Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, (2) Untuk mengetahui peran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kajar Tengguli Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini adalah peran Alokasi Dana Desa bagi peningktan masyarakat Desa Kajar Tengguli sebagai berikut: Meningkatkan tingkat kesehatan mayarakat Desa Kajar Tengguli, Meningkatkan tingkat pendidikan di Desa Kajar Tengguli, Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kajar Tengguli. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan dalam beberapa indikator kesejahteraan, mulai dari tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat perumahan dan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat. Peningkatan yang terjadi karena adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan pemerintah desa.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Masyarakat Desa

Abstract:

This study aims to determine and analyze the role of the Village Fund Allocation for improving the welfare of the people of Kajar Tengguli Village. The data in this study use primary data and secondary data, primary data obtained when conducting research at the research location, while secondary data obtained from journals, previous studies and several other references. The object of this study was the Kajar Tengguli Village, Prambon Subdistrict, Sidoarjo Regency. This research uses qualitative research methods through descriptive. The objectives of this study are: (1) To find out the management of Village Fund Allocation (ADD) in Kajar Tengguli Village, Prambon District, Sidoarjo Regency, (2) To find out the role of Village Fund Allocation (ADD) for improving the welfare of the community of Kajar Tengguli Village, Prambon District, Sidoarjo Regency. The results of this study are the role of the Village Fund Allocation for the improvement of the community of Kajar Tengguli Village as follows: (1) Improving the level of community health of the Kajar Tengguli Village, (2) Increasing the level of education in the Kajar Tengguli Village, (3) Increasing the income of the community of Kajar Tengguli Village. This can be seen from the increase in several indicators of welfare, starting from the level of income, health level, education level, housing level and the level of public consumption expenditure. The increase occurred due to an increase in village community empowerment by the village government.

Keywords: Village Fund Allocation, Community Welfare, Village Communities

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa menjadi sangat diperhatikan oleh kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Salah satu yang paling diperhatikan yaitu tentang otonomi daerah khususnya pedesaan, maupun peraturan yang melingkupinya. Sudah dicantumkan pada RAPBN tahun 2020 bahwasanya, jumlah desa yang ada di Indonesia 74.957 desa ini diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa.

Desa merupakan unsur yang paling penting didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, keadaan tersebut tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan ke dalam Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintah negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Desa sudah ada sebelum Hindia Belanda masuk ke Indonesia, Cornelis Van Vollenhoven dalam Adi Supraja, 2017 mengatakan bahwa sebelum Hindia Belanda masuk ke Indonesia telah ada desa yang dinamakan dengan “lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintahan seperti kesatuan perkampungan, kerajaan-kerajaan dan malah republik-republik. Republik-republik yang dimaksud adalah suatu pemerintahan demokrasi yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom yang berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa desa sudah tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berlandaskan atas peraturan ini maka desa memiliki hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Wewenang ini diberikan kepada desa sebagai bentuk upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan pelayanan sesuai tuntutan dan prakarsa masyarakat desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah memberikan perhatian sebesar-besarnya pada desa untuk melakukan pembangunan di desa. Dengan dikeluarkannya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah berharap supaya seluruh desa yang ada di Indonesia mampu berubah menjadi desa yang mandiri dan produktif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa desa sudah tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dikeluarkannya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah berharap supaya seluruh desa yang ada di Indonesia mampu berubah menjadi desa yang mandiri dan produktif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa pasal 68 ayat (1) poin c dinyatakan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensidesa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja kesempatan berusaha bagi masyarakatdesa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakatdesa

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian: *“Peran Alokasi Dana Desa Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kajar Tengguli Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo”*.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Definisi desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

Alokasi Dana Desa

Menurut (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten atau Kota.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan mikik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 133 Tahun 2014).

Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” atau “power” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari kemampuan tersebut pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya,

atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, Rudy dalam Riska Aprilia, 2019).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan (Field Research).

Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Menurut (Suhasimi Arikunto dalam Deswandi, 2018), deskriptif analisis adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman (Prastowo dalam Riska Apriliana, 2017) dimana analisis data kualitatif adalah proses analisis yang terdiri dari tiga alur (Triangulasi) kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Jenis dan Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dalam penelitian, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat dan aparat desa dan tokoh masyarakat di Desa Kajar Tengguli.

Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapat dari sumber pustaka yang sesuai dengan permasalahan penelitian saat ini, seperti: jurnal penelitian, referensi penelitian terdahulu, internet dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Desa Kajar Tengguli memiliki luas wilayah ± 139 Ha dengan kondisi alam daerah pedesaan yang terletak ± 950 m dari kota

Kecamatan, ± 22 Km dari kota Kabupaten dan ± 38 Km dari ibu kota Provinsi. Terdiri dari 3 Dusun yaitu : Dusun Kajar, Dusun Tengguli, dan Dusun Jabon. Desa Kajar Tengguli memiliki jumlah penduduk sampai pada tahun 2019 ± 3.088 jiwa, dengan jumlah rumah tangga ± 741 kepalakeluarga.

Pengelolaan ADD di Desa Kajar Tengguli

Tabel 1
Pembagian Dana Program Kerja Tahun 2018

No	Uraian	Satuan
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp.654.610.233
2.	Bidang pelaksanaan pembanguna desa	Rp.488.729.250
3.	Bidang pembinaan masyarakat desa	Rp.104.160.000
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat desa	Rp.210.631.600
5.	Bidang penanggulangan bencana mendesak desa	Rp.4.960.000
Total		Rp.1.463.091.080

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Tabel 2
Pembagian dan Program kerja di Desa Kajar Tengguli.

No	Uraian	Satuan
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp.605.331.426
2.	Bidang pelaksanaan pembanguna desa	Rp.622.910.000
3.	Bidang pembinaan masyarakat desa	Rp.158.974.000
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat desa	Rp.428.546.002
5.	Bidang penanggulangan bencana mendesak desa	Rp.5.181.592
Total		Rp.1.820.943.020

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Analisis Peran ADD bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3
Perubahan Angka Indikator Kesejahteraan Pada Tahun 2018 dan 2019

INDIKATOR	ADD 2018	ADD 2019	KETERANGAN
Tingkat Pendidikan	70%	85%	Mengalami Peningkatan
Tingkat Kesehatan	85%	93%	Mengalami Peningkatan
Tingkat Pendapatan Masyarakat	Rp.600.000- Rp.2.800.000	Rp.800.000- Rp.3.500.000	Mengalami Peningkatan
Tingkat Pengeluaran Masyarakat	Rp.500.000- Rp.850.000	Rp.750.000- Rp.1.000.000	Mengalami Peningkatan
Tingkat Perumahan Masyarakat	85%	95%	Mengalami Peningkatan
Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	70%	80%	Mengalami Peningkatan

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

1. Tingkat Pendidikan.

Dampak adanya program ADD di Desa Kajar Tengguli pada bidang pendidikan sudah dapat di rasakan oleh masyarakat sekitar, namun pengalokasian dana tersebut hanya dialokasikan ke pendidikan setingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) saja, belum menyentuh pada pendidikan SMA/SMK.

2. Tingkat Kesehatan.

Dari program ADD (Alokasi Dana Desa) untuk kesehatan yaitu diadakannya kegiatan posyandu setiap satu bulan sekali di balai RW yang ada pada setiap dusun desa Kajar Tengguli dengan adanya kegiatan posyandu setiap bulan tersebut dapat kesehatan akan lebih sehat dan telah mensejahterakan masyarakat di tingkat kesehatan. masyarakat Desa Kajar Tengguli dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi, hal ini terlihat dari kecukupan akan makan yang di konsumsi oleh masyarakat.

3. Tingkat Pendapatan.

Adanya ADD ini memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, namun tidak memberikan peningkatan yang sangat tinggi, ini karena program ADD (Alokasi Dana Desa) serta pengelolaan di Desa Kajar Tengguli kurang dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Kajar Tengguli sudah menggunakan ADD (Alokasi Dana Desa) untuk kegiatan pemberdayaan yaitu berupa koperasi usaha kecil dan menengah namun pengelolanya belum dikelola dengan baik

4. Tingkat pengeluaran.

Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu karena masyarakat di Desa Kajar Tengguli mayoritas buruh pabrik yang mengandalkan penghasilan bulanan. Namun jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka semakin sedikit, maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran konsumsi berkisar Rp.60.000-90.000 (enam puluh ribu sampai sembilan puluh ribu rupiah) perhari.

5. Tingkat Perumahan.

Bentuk bangunan rumah masyarakat Desa Kajar Tengguli sebesar 99% permanen, 1,0% semi permanen, sudah tidak ada lagi rumah masyarakat Desa Kajar Tengguli yang semi permanen, dan seluruh status kepemilikan adalah milik sendiri. Sedangkan MCK warga juga 93% yang memiliki sanitasi yang baik selebihnya hanya MCK seadanya. Kondisi sumber air bersih juga sudah memadai, bahkan sudah ada pengelolaan air bersih yang dikelola oleh pihak pemerintah desa tetapi masih belum dirasakan oleh seluruh warga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis pengolahan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Pada pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 dan 2019 di Desa Kajar Tengguli dalam mendistribusikan ADD sudah cukup baik, terlihat dari proporsi pembagian ADD untuk masing-masing bidang seperti untuk bidang penyelenggaraan kegiatan aparatur desa, bantuan lembaga kepemimpinan

masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat, sudah sesuai dengan peraturan sebagaimana mestinya. 2) Faktor pendorong dan penghambat pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Faktor-faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kajar Tengguli adalah Dukungan Kebijakan Dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kualitas Sumber Daya Manusia, partisipasi masyarakat sangat mendukung kegiatan ini dengan dilakukannya secara bergotong royong untuk memajukan perkembangan desa yang lebih maju. Sementara itu faktor penghambat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kajar Tengguli pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Jumlah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Kurangnya intensitas sosialisasi. 3) Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan, peran ADD (Alokasi Dana Desa) yang dikelola di Desa Kajar Tengguli memiliki peran sebagai berikut: a) Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat Desa KajarTengguli b) Meningkatkan tingkat pendidikan di Desa KajarTengguli. c) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa KajarTengguli. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diajukan beberapa hal yang diharapkan bisa dilakukan yaitu: 1) Untuk pemerintah desa ataupun Instansi terkait lebih bisa dalam memperhatikan pelatihan pengelolaan keuangan untuk aparatur desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang diharapkan untuk kedepannya dalam pengelolaan keuangan pedapatan desa bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan. Untuk pemerintah desa seharusnya program Alokasi Dana Desa lebih mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan terfokus pada operasional desa saja dan benar-benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan diharapkan kepada pemerintah desa untuk mampu memiliki rasa kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat secara merata. 2) Dengan menerapkan prinsip memiliki tanggung jawab sosial untuk berperilaku ekonomi yang adil dan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan pendapatan secara pribadi atau kelompok tertentu saja. Diharapkan kedepan, para pemimpin-pemimpin bangsa ini lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh rakyat, agar tercapai kemaslahatan umat (falah) yang nantinya diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan nasional. 3) Kepada masyarakat Desa Kajar Tengguli sebaiknya lebih cerdas lagi dalam memeriksa dan mengawasi jalannya kegiatan penggunaan pendapatan pemerintah desa. Supaya kecurang-kecurangan yang terjadi selama ini bisa berkurang, dan menimbulkan rasa sadar kepada seluruh elemen masyarakat untuk berlaku adil dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, edisi ke-4, cetakan ke-2.
Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, edisi ke-1, cetakan ke-19. Jakarta: Rajawali Pers. 454 hlm, ISBN 979-421-413-2.

Pedoman Teknis Pelaksanaan MUSRENBANG Kabupaten Tahun 2017 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2018.

Cici Annike Wulan. 2018. Analisis Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, JOM FEB, 1(1)
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/20931>.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.